

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada perencanaan strategis Sistem Informasi dan Teknologi Informasi di Pemerintah Daerah Pringsewu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain yaitu:

1. Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini menggambarkan bahwa penerapan SI/TI yang saat ini dilakukan di Pemerintah Daerah Pringsewu belum dapat mendukung proses bisnis secara keseluruhan. Analisis dilakukan terhadap kondisi terkini pada Pemerintah Daerah Pringsewu.
2. Pemodelan bisnis yang dikelola oleh Bagian Informatika Pemerintah Daerah Pringsewu memiliki aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas Utama meliputi Manajemen Pelayanan Masyarakat (MAPM), Manajemen Kewilayahan (MAKEW), Manajemen Kepemerintahan (MAKEP), Manajemen Pembangunan (MAPEM), Manajemen Sarana dan Prasarana (MAPRAS), Manajemen Pegawai (MAPEG), Manajemen Keuangan (MAKEU), Manajemen Administrasi Umum (MAD), Manajemen Legislasi (MALEG).
3. Hasil yang diperoleh dari arsitektur sistem informasi terdiri dari 132 entitas data dari 9 fungsi bisnis dan 28 aplikasi yang akan diimplementasikan dalam jangka waktu 5 tahun, sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

4. Arsitektur teknologi yang berupa rancangan topologi jaringan sudah mewakili kondisi saat ini dan rencana dalam pengembangan teknologi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (2019-2023).
5. Arsitektur aplikasi saat ini masih menggunakan *platform* yang berbeda-beda, sehingga harus dilakukan pergantian secara keseluruhan untuk menjamin integritas dan keselarasan SI/TI yang akan dibangun berdasarkan model EA menggunakan kerangka TOGAF ADM yang diusulkan.

5.2.Saran

Saran yang dapat diberikan penulis dalam rangka pengembangan penelitian ini, yaitu:

1. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang akan dilakukan di Pemerintah Daerah Pringsewu harus mendapatkan dukungan dan komitmen oleh para pihak di level manajemen pemerintahan.
2. Harus ada kesiapan dari segi infrastruktur teknologi sehingga usulan rencana strategis SI/TI yang telah disusun dapat diimplementasikan sesuai dengan perencanaan.
3. Tatakelola TI harus diawali dari pembentukan komite TIK oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati, hal ini sesuai dengan pedoman umum TIK Nasional.
4. Pengembangan aplikasi harus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tahapan implementasi yang telah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan Pemerintah Daerah Pringsewu.

5. Harus adanya penambahan sumber daya manusia (SDM) di bidang TIK atau dengan melakukan pelatihan kepada SDM yang ada pada Bagian Informatika Pemerintah Daerah Pringsewu.